



Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Aktivitas Pusat Kajian Politik Uin Sumatera Utara Medan (Studi Kasus Perspektif Tafsir Sosial)

Aminuddin^{1*}, Siti Maryam², Annisa Ramadhani Saragih³, Nurul Huda⁴, Malika Shaqi⁵

¹⁻⁵Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: aminuddin@uinsu.ac.id¹, sitimaryam12790@gmail.com², anisahramadhanisarahigh@gmail.com³, huda73472@gmail.com⁴, malikashaqi73@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: aminuddin@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Qur'anic values in the activities of the Political Studies Center (Puskapol) at UIN North Sumatra Medan through the perspective of Social Tafsir (Al-Tafsir al-Ijtima'i). As an academic institution under the auspices of an Islamic university, Puskapol UINSU bears a moral responsibility to integrate theological values into socio-political analysis. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation of institutional activities, documentation of work programs, and related literature studies. The findings reveal that Puskapol UINSU actualizes Qur'anic values such as Al-Amanah (integrity), Al-'Adalah (justice), and Al-Syuura (participatory democracy) in the forms of policy research, social advocacy, and civic political education. From the perspective of social tafsir, these activities are not merely mechanical academic practices, but rather forms of social transformation that position the Qur'an as an instrument of liberation and a solution to contemporary political issues in North Sumatra. This study concludes that the substantial internalization of Qur'anic values is capable of fostering a more dignified political ethics that is responsive to public welfare.*

Keywords: Al-Qur'an; Islamic Politics; Justice; Puskapol UINSU; Social Tafsir.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas Pusat Kajian Politik (Puskapol) UIN Sumatera Utara Medan melalui kacamata Tafsir Sosial (Al-Tafsir al-Ijtima'i). Sebagai institusi akademik di bawah naungan universitas Islam, Puskapol UINSU memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan nilai teologis ke dalam analisis sosial-politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dihimpun melalui observasi aktivitas lembaga, dokumentasi program kerja, dan studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskapol UINSU mengaktualisasikan nilai-nilai Qur'ani seperti Al-Amanah (integritas), Al-'Adalah (keadilan), dan Al-Syuura (demokrasi partisipatif) ke dalam bentuk riset kebijakan, advokasi sosial, dan pendidikan politik kewargaan. Dalam perspektif tafsir sosial, aktivitas ini bukan sekadar kegiatan akademik mekanis, melainkan bentuk transformasi sosial yang menjadikan Al-Qur'an sebagai instrumen pembebasan dan solusi atas problematika politik kontemporer di Sumatera Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai Al-Qur'an secara substansial mampu mendorong terciptanya etika politik yang lebih bermartabat dan responsif terhadap kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Keadilan; Politik Islam; Puskapol UINSU; Tafsir Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai universal yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial dan politik. Dalam konteks masyarakat modern, peran Al-Qur'an semakin penting sebagai landasan moral dan etika dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan dinamika sosial-politik yang kompleks (Nasr, 2002). Nilai-nilai Al-Qur'an seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan toleransi menjadi sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam membangun tatanan masyarakat yang

harmonis dan berkeadaban. Dalam zaman globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial-politik yang rumit, masyarakat menemui berbagai tantangan, seperti ketidaksamaan sosial, perseteruan politik, ketidakadilan peradilan, sampai penurunan moral dalam berbagai segi kehidupan. Hal ini membutuhkan solusi yang tidak hanya efisien tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip universal yang dapat membangun struktur sosial yang seimbang dan Harmonious. Al-Qur'an dan Hadits sebagai basis inti ajaran Islam memberikan petunjuk etika dan moral yang berkaitan untuk mengatasi tantangan ini. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kesempatan untuk nilai-nilai keagamaan untuk ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Jannatul Firdausiyah, 2025). Hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16] : 90)

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab, sebagaimana sabdanya: *"Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial-politik menjadi isu yang terus berkembang. Perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam aktivitas akademik dan sosial, termasuk melalui pusat-pusat kajian politik. Pusat Kajian Politik UIN Sumatera Utara Medan merupakan salah satu lembaga yang berupaya mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitasnya, baik dalam bentuk penelitian, diskusi, maupun advokasi kebijakan publik.

Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas pusat kajian politik menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami tafsir sosial, serta pengaruh arus pemikiran sekuler yang kerap kali bertentangan dengan nilai-nilai keislaman (Fauzan, 2019). Selain itu, dinamika politik lokal dan nasional juga mempengaruhi bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diimplementasikan secara efektif dalam aktivitas pusat kajian politik.

Perspektif tafsir sosial menjadi penting dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks kekinian. Tafsir sosial berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diaplikasikan secara relevan dan kontekstual (Arkoun, 1996). Dengan demikian, studi tentang implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas Pusat Kajian Politik UIN Sumatera Utara Medan melalui perspektif tafsir sosial menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian ini menjadi relevan di tengah meningkatnya kebutuhan akan integrasi nilai-nilai keislaman dalam aktivitas sosial-politik, khususnya di lingkungan akademik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir sosial di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga serupa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga nilai praktis dalam upaya membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*). Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap Pusat Kajian Politik (Puskapol) UIN Sumatera Utara sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Dengan studi kasus, peneliti dapat mengamati secara detail bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya berhenti sebagai jargon, tetapi benar-benar terimplementasi dalam dinamika organisasi dan aktivitas rutin lembaga tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Pendekatan *Teologis-Sosiologis* (Tafsir Sosial). Sesuai dengan judul penelitian, peneliti menggunakan pendekatan Tafsir Sosial (*Al-Tafsir al-Ijtima'i*). Pendekatan ini tidak hanya melihat Al-Qur'an dari sisi tekstual-normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Dalam hal ini, aktivitas Puskapol UINSU dianalisis sebagai wujud nyata dari upaya "membumikan" ayat-ayat politik (seperti ayat tentang keadilan, amanah, dan musyawarah) agar responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat di Medan, Sumatera Utara.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui teknik *purposive sampling* yaitu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Direktur Puskapol UINSU, para peneliti senior, dan staf ahli yang terlibat langsung dalam perumusan program kerja. Mengingat posisi peneliti sebagai *intern* (magang) riset, data primer juga diperoleh melalui pengamatan terlibat terhadap aktivitas keseharian, proses diskusi internal dalam membedah isu politik, serta pelaksanaan kegiatan lapangan yang dilakukan oleh Puskapol UINSU. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen internal yaitu Profil lembaga, rencana strategis (Renstra), laporan tahunan kegiatan, dan arsip program kerja Puskapol UINSU Medan. Dan literatur yang terkait yaitu Kitab-kitab tafsir yang memiliki corak *Ijtima'i* (seperti Tafsir Al-Azhar atau Al-Misbah) dan buku-buku referensi mengenai teori politik Islam yang relevan dengan lokus penelitian.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama sebagai berikut: Pertama, Observasi Terlibat (*Participant Observation*): Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas Pusat Kajian Politik (Puskapol) UIN Sumatera Utara. Sebagai peneliti yang terlibat dalam program magang riset, peneliti mengamati bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an diinternalisasikan dalam perilaku organisasi, proses pengambilan keputusan, hingga interaksi dalam diskusi-diskusi akademik terkait isu politik kontemporer di Medan. Kedua, Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Teknik ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara semi-terstruktur kepada para informan. Wawancara difokuskan pada pemahaman aktor lembaga mengenai konsep Tafsir Sosial dan bagaimana mereka menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an (seperti tema keadilan, musyawarah, dan amanah) ke dalam rencana aksi atau program kerja Puskapol. Hal ini bertujuan untuk mengungkap aspek motivasi dan nilai filosofis di balik setiap aktivitas. Ketiga, Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan. Keempat, Triangulasi Data: Setelah data terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti melakukan pengecekan silang (triangulasi) untuk memastikan konsistensi data.

Setelah semua data terkumpul peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan model alir (*Interactive Model*) dari Miles, Huberman, dan Saldana. Proses analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama, Kondensasi Data (*Data Condensation*): Peneliti memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan saat observasi di Puskapol UINSU, dan dokumen lembaga. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data pada poin-poin yang berkaitan langsung dengan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an (seperti

integritas, keadilan, dan musyawarah) dan membuang informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Kedua, Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur. Peneliti menyusun matriks keterkaitan antara aktivitas praktis Puskapol UINSU (seperti riset kebijakan atau pendidikan politik) dengan perspektif Tafsir Sosial. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola implementasi nilai yang muncul di lapangan. Ketiga, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verifying*): Tahap akhir adalah merumuskan simpulan dari temuan penelitian. Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan menggunakan kerangka pemikiran Tafsir Sosial (*Al-Tafsir al-Ijtima'i*). Simpulan ini diverifikasi secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa temuan mengenai cara Puskapol UINSU "membumikan" nilai Al-Qur'an telah sesuai dengan fakta lapangan dan landasan teoretis yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Al-Quran dalam Aktivitas Pusat Kajian Politik (Puskapol) UIN Sumatera Utara Medan

Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas Pusat Kajian Politik (Puskapol) UIN Sumatera Utara Medan dilakukan melalui pendekatan integrasi-interkoneksi, di mana nilai-nilai teologis diterjemahkan ke dalam program kerja akademik dan sosial. Berdasarkan perspektif Tafsir Sosial (*Al-Tafsir al-Ijtima'i*), berikut adalah beberapa bentuk implementasi nyatanya:

Internalisasi Nilai *Al-Amanah* (Integritas Akademik)

Konsep *amanah* (kepercayaan) dalam memimpin adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa Ayat 58)

Ayat ini menerangkan bahwa pemimpin harus dapat menjaga amanah dengan adil dan memberikan hak kepada yang berhak. Pemimpin yang amanah akan menjaga kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks politik modern, prinsip amanah ini relevan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (Jannatul Firdausiyah, 2025). Dalam aktivitas riset dan kajian, nilai Al-Amanah dalam QS. An-Nisa ayat 58 diimplementasikan melalui kejujuran intelektual. Puskapol UINSU memposisikan diri sebagai lembaga yang objektif dalam membedah data politik, tanpa intervensi kepentingan praktis yang merugikan publik.

Manifestasi Nilai Al-'Adalah (Keadilan Sosial)

Keadilan sangatlah penting dalam islam untuk menetapkan sesuatu kekuasaan dengan seadil-adilnya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran, QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ وَعَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8).

Ayat ini menegaskan bahwa saat membuat keputusan, seorang pemimpin atau individu perlu senantiasa bersikap adil, tanpa memperhatikan asal-usul, kelompok, atau perspektif pribadi. Keadilan merupakan dasar yang perlu diterapkan dalam semua aspek kehidupan, khususnya dalam penyusunan kebijakan publik yang berpengaruh pada masyarakat secara keseluruhan. Keputusan yang diambil Adil akan menjamin adanya keadilan sosial serta kesejahteraan untuk seluruh masyarakat (Jannatul Firdausiyah, 2025).

Nilai keadilan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah ayat 8) menjadi ruh dalam aktivitas advokasi. Puskapol berperan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan yang dianggap diskriminatif atau tidak berpihak pada kelompok Mustad'afin (masyarakat lemah).

Penerapan Nilai Al-Syuura (Demokrasi Partisipatif)

Dalam Islam, prinsip musyawarah atau konsultasi sangatlah penting dalam pengambilan keputusan hukum, Allah menegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَأَمْْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka," (QS. Asy-Syura 42: Ayat 38)

Konsep musyawarah atau Syuura (QS. Asy-Syura ayat 38) diimplementasikan melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Prinsip musyawarah mengajarkan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk dalam masalah hukum, harus melibatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana.

Nilai Al-Ittihad dan Tasamuh (Persatuan dan Toleransi)

Persatuan dan toleransi dalam kehidupan politik sangatlah penting. Allah menjelaskan dalam firmanNya QS. Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

Mengingat lokasi UINSU berada di Medan yang multikultural, nilai keberagaman dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat ayat 13) menjadi landasan dalam menjaga stabilitas sosial-politik daerah.

Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an di Pusat Kajian Politik

Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam sebuah Pusat Kajian Politik (Puskapol) memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga dakwah konvensional. Hal ini dikarenakan PUSKAPOL berdiri di persimpangan antara idealisme teks keagamaan dan realitas politik yang pragmatis serta empiris. Berikut adalah uraian mendalam mengenai tantangan-tantangan tersebut: Tantangan Epistemologis: Integrasi Teks dan Sains Politik. Tantangan pertama yang bersifat fundamental adalah benturan epistemologis antara teks wahyu yang bersifat absolut dengan ilmu politik yang bersifat empiris dan relatif. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip universal seperti keadilan ('adalah) dan kejujuran (siddiq), namun teks tersebut tidak memberikan juknis (petunjuk teknis) mendetail mengenai sistem pemilu, manajemen konflik, atau teknik survei opini publik (Zarkasyi, 2012). Pusat kajian politik seringkali terjebak dalam dilema antara menjaga sakralitas teks atau mengikuti rigiditas metodologi ilmiah modern.

Upaya integrasi ini menuntut kemampuan untuk melakukan objektifikasi nilai. Peneliti di pusat kajian harus mampu menerjemahkan bahasa normatif agama ke dalam bahasa publik yang rasional tanpa menghilangkan esensi spiritualnya (Abdullah, 2006). Sebagai contoh,

konsep amanah dalam Al-Qur'an harus dibedah secara ilmiah menjadi indikator akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Proses penerjemahan nilai ke dalam instrumen kebijakan ini seringkali mengalami kebuntuan metodologis karena kurangnya perangkat epistemik yang mampu menjembatani kedua ranah tersebut (Safi, 1996).

Selain itu, terdapat tantangan dalam menghindari “labelisasi” atau sekadar mencocok-cocokkan ayat (gatum-maug) dengan fenomena politik yang sedang terjadi. Implementasi nilai Al-Qur'an di pusat kajian politik menuntut adanya kerangka berpikir yang konsisten, di mana ayat bukan hanya menjadi pelengkap orasi, melainkan menjadi basis filosofis dalam merancang desain penelitian. Jika integrasi ini tidak dilakukan secara serius, maka kajian yang dihasilkan hanya akan menjadi kajian umum yang diberi sentuhan agama di permukaannya saja, tanpa menyentuh substansi etis yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Dilema Independensi dan Tekanan Politik Praktis.

Pusat kajian politik yang berada di bawah naungan institusi akademik keagamaan seringkali berada di bawah pengawasan birokrasi dan kepentingan politik tertentu. Implementasi nilai asy-Syura (musyawarah) dan al-Hurriyah (kebebasan) dalam konteks riset menuntut adanya independensi intelektual yang mutlak (Rakhmat, 2006). Namun, pada kenyataannya, pusat kajian seringkali dihadapkan pada tekanan untuk memberikan legitimasi teologis bagi kebijakan otoritas atau kelompok kepentingan. Menjaga jarak yang sehat antara idealisme akademik-religius dan kepentingan politik praktis merupakan perjuangan eksistensial yang nyata.

Tekanan ini semakin terasa ketika hasil kajian lembaga menunjukkan adanya ketidakadilan atau pelanggaran nilai-nilai Al-Qur'an oleh pemegang kekuasaan. Ada risiko pengucilan atau penghentian dukungan jika pusat kajian terlalu vokal dalam menyuarakan kebenaran berdasarkan perspektif wahyu (Hidayat, 2006). Di sini, nilai syaja'ah (keberanian moral) diuji; apakah lembaga tersebut akan tetap menjadi kompas moral bagi masyarakat atau berubah menjadi sekadar alat humas politik. Ketegangan antara menjaga keberlangsungan lembaga dan menjaga integritas nilai Al-Qur'an adalah tantangan yang terus berulang.

Lebih jauh lagi, lingkungan politik yang cenderung pragmatis seringkali menganggap nilai-nilai etis dari Al-Qur'an sebagai hambatan bagi efektivitas politik. Pusat kajian harus mampu meyakinkan para aktor politik bahwa integritas yang bersumber dari nilai agama justru merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas sosial. Tantangan ini melibatkan kemampuan negosiasi dan diplomasi intelektual agar nilai-nilai Al-Qur'an tetap memiliki daya tawar di tengah pasar ideologi politik yang sangat kompetitif dan seringkali mengabaikan moralitas. Resistensi Metodologis dan Profesionalisme SDM.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pusat kajian politik. Untuk mengimplementasikan nilai Al-Qur'an secara efektif, dibutuhkan individu yang tidak hanya hafal atau paham teks agama, tetapi juga mahir dalam menggunakan alat analisis ilmu sosial modern. Realitasnya, sering terjadi dikotomi keahlian; pakar agama kurang memahami teknis analisis politik, sementara pakar politik kurang memiliki kedalaman dalam memahami hermeneutika Al-Qur'an (Wirman, 2019). Kesenjangan kompetensi ini menghambat terciptanya kajian yang benar-benar terintegrasi.

Resistensi juga muncul dari kalangan akademisi sekuler atau praktisi politik yang meragukan objektivitas kajian berbasis agama. Pusat kajian politik harus bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan bahwa metodologi mereka kredibel secara saintifik dan tidak bias secara sektarian. Implementasi nilai Al-Qur'an tentang profesionalisme (itqan) menuntut standar kerja yang sangat tinggi dalam pengumpulan data, pengolahan statistik, hingga penulisan laporan. Tanpa profesionalisme yang melampaui standar umum, pesan-pesan moral Al-Qur'an yang diusung akan sulit diterima oleh komunitas ilmiah dan pembuat kebijakan.

Terakhir, terbatasnya pendanaan dan sarana prasarana seringkali membuat pusat kajian politik kesulitan untuk melakukan riset yang mendalam dan berkelanjutan. Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an memerlukan dukungan riset lapangan yang kuat agar tidak hanya menjadi menara gading. Kurangnya dukungan logistik seringkali memaksa lembaga untuk mengambil proyek-proyek instan yang mungkin kurang selaras dengan misi utama implementasi nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, membangun ekosistem pendanaan yang mandiri dan tidak mengikat menjadi tantangan manajerial yang sangat krusial bagi keberlangsungan visi lembaga.

Analisis Perspektif Tafsir Sosial dalam Aktivitas Pusat Kajian Politik

Dekonstruksi Tekstual menuju Rekonstruksi Sosial. Tafsir sosial dalam pusat kajian politik dimulai dengan proses dekonstruksi terhadap pemahaman ayat-ayat politik yang selama ini cenderung dipahami secara sempit atau hanya dalam koridor sejarah masa lalu (Shihab, 1992). Seringkali, teks Al-Qur'an tentang kekuasaan hanya dijadikan alat legitimasi status quo atau dipahami secara utopis tanpa pijakan bumi. Melalui perspektif al-tafsir al-ijtima'i, pusat kajian politik berupaya membongkar pemahaman pasif tersebut dan menggantinya dengan pembacaan yang kritis dan transformatif (Harb, 2003).

Dalam aktivitasnya, pusat kajian melakukan rekonstruksi sosial dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai energi penggerak untuk perubahan. Artinya, setiap riset politik yang dilakukan bertujuan untuk menemukan "ruh" keadilan di balik teks yang kemudian diaplikasikan untuk memperbaiki struktur masyarakat. Jika teks berbicara tentang kaum mustad'afin (kelompok yang tertindas), maka pusat kajian politik menerjemahkannya ke dalam analisis kebijakan

mengenai perlindungan hak-hak buruh, masyarakat adat, atau kelompok marginal lainnya yang sering terabaikan dalam dinamika politik praktis (Hanafi, 1995). Proses rekonstruksi ini juga menuntut pusat kajian untuk berani melakukan kritik internal terhadap penafsiran keagamaan yang tidak pro-keadilan. Aktivitas ini memastikan bahwa agama tidak lagi dipandang sebagai “candu” yang meninabobokan masyarakat dalam ketidakadilan, melainkan sebagai pedoman kritis untuk menggugat ketimpangan. Dengan demikian, tafsir sosial memberikan landasan filosofis bagi pusat kajian politik untuk menyusun narasi perlawanan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan melalui argumen teologis yang kokoh (Rahardjo, 1996).

Terakhir, rekonstruksi sosial ini bertujuan untuk menciptakan tatanan publik yang lebih inklusif. Pusat kajian politik menggunakan tafsir sosial untuk merumuskan konsep kewargaan (citizenship) yang berbasis pada nilai-nilai Piagam Madinah. Hal ini penting agar aktivitas politik tidak terjebak dalam sentimen sektarian, melainkan fokus pada kemaslahatan umum (al-maslahah al-mursalah). Dengan cara ini, Al-Qur'an hadir sebagai solusi universal yang melampaui sekat-sekat identitas dalam ruang publik. Metodologi Dialektika: Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi. Metodologi dialektika yang digunakan oleh pusat kajian politik merupakan jembatan antara dunia teks yang statis dan dunia sosial yang dinamis. Tahap pertama, yakni analisis teks, dilakukan dengan menggunakan perangkat hermeneutika yang ketat untuk menangkap pesan moral universal di balik ayat. Peneliti tidak hanya terpaku pada makna literal, tetapi menggali maqashid (tujuan) dari setiap perintah atau larangan Tuhan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Setelah makna universal ditemukan, pusat kajian politik melakukan analisis konteks yang tajam dengan menggunakan perangkat ilmu sosial modern. Di sini, aktivitas pusat kajian melibatkan survei lapangan, analisis data sekunder, dan observasi partisipatif untuk membedah realitas sosial yang sedang terjadi (Engineer, 1992). Dialektika ini memastikan bahwa teks Al-Qur'an tidak dipaksa untuk menjawab masalah secara instan, melainkan diajak berdialog dengan realitas yang kompleks agar menghasilkan solusi yang realistis dan tidak bersifat menghakimi.

Kontekstualisasi menjadi tahap krusial di mana nilai-nilai Al-Qur'an diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Sebagai contoh, nilai musyawarah (shura) dikontekstualisasikan dalam bentuk penguatan sistem demokrasi deliberatif atau partisipasi publik dalam penyusunan Perda (Esack, 1997). Aktivitas ini menunjukkan bahwa pusat kajian politik mampu mengubah norma agama yang abstrak menjadi instrumen teknis yang dapat diukur keberhasilannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Selain itu, metodologi dialektika ini berfungsi sebagai filter terhadap ideologi-ideologi politik luar yang masuk. Pusat kajian menggunakan tafsir sosial untuk memilah mana aspek dari demokrasi atau sistem politik modern yang sejalan dengan nilai Al-Qur'an dan mana yang harus dikritisi (Fadl, 2001). Proses ini memastikan bahwa keterlibatan intelektual dalam politik tetap memiliki identitas Islam yang kuat namun tetap terbuka terhadap kemajuan zaman dan inovasi dalam ilmu politik. Al-Qur'an sebagai Instrumen Kritik Kebijakan. Pusat kajian politik memposisikan Al-Qur'an sebagai "standar etik tertinggi" dalam mengevaluasi setiap kebijakan publik. Aktivitas ini dilakukan dengan melakukan policy review atau peninjauan kebijakan melalui perspektif nilai-nilai Qur'ani. Jika sebuah kebijakan pemerintah berpotensi merugikan rakyat kecil atau merusak lingkungan, pusat kajian akan mengeluarkan pernyataan sikap atau kajian akademik yang berbasis pada argumen bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan masalah (Umar, 2014).

Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak digunakan untuk memukul lawan politik, tetapi untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada pada jalurnya. Kritik kebijakan yang dilakukan oleh pusat kajian politik selalu mengedepankan argumentasi yang argumentatif dan berbasis data, sehingga kritik tersebut tidak dianggap sebagai serangan personal melainkan sebagai bentuk pengabdian intelektual. Tafsir sosial memberikan keberanian bagi peneliti untuk menyuarakan kebenaran (kebenaran moral) di hadapan penguasa.

Fungsi kritik ini juga mencakup pengawasan terhadap implementasi hukum di masyarakat. Pusat kajian politik mengamati apakah prinsip keadilan yang diperintahkan Al-Qur'an sudah dirasakan oleh semua lapisan warga negara tanpa terkecuali. Jika terjadi diskriminasi hukum, maka tafsir sosial digunakan untuk mengingatkan bahwa dalam Islam, kedudukan setiap orang adalah sama di hadapan hukum (al-musawah amam al-qanun), sebuah prinsip yang seringkali diabaikan dalam praktik politik transaksional.

Lebih jauh lagi, instrumen kritik ini bertujuan untuk mengedukasi publik agar memiliki kesadaran politik yang berbasis nilai. Pusat kajian politik berperan aktif dalam melakukan literasi politik kepada masyarakat, sehingga warga negara mampu menilai kualitas pemimpin mereka berdasarkan standar moral Al-Qur'an. Dengan demikian, kritik kebijakan yang bersumber dari tafsir sosial ini menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat, di mana setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Transformasi dari Isu Teologis ke Isu Publik. Tantangan terbesar pusat kajian politik adalah menerjemahkan bahasa wahyu yang sarat akan istilah teknis keagamaan ke dalam bahasa publik yang inklusif. Aktivitas transformasi ini melibatkan proses "sekularisasi" dalam arti positif, yaitu mengubah nilai-nilai sakral menjadi nilai-nilai sipil yang dapat dipahami oleh semua orang, termasuk

mereka yang berbeda keyakinan. Konsep khilafah dalam arti tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi, misalnya, ditransformasikan menjadi isu good governance dan pelestarian lingkungan. Transformasi ini sangat penting agar nilai-nilai Al-Qur'an tidak dianggap sebagai ancaman bagi kemajemukan, melainkan sebagai kontribusi berharga bagi kemajuan bangsa. Pusat kajian politik merumuskan kembali istilah teologis seperti falah (keberuntungan) menjadi konsep kesejahteraan sosial yang nyata. Dengan cara ini, kajian yang dihasilkan memiliki daya jangkau yang luas dan mampu memengaruhi opini publik secara lebih efektif karena menyentuh kepentingan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, pusat kajian politik menggunakan tafsir sosial untuk mengubah fokus umat dari perdebatan ritual-formal menuju isu-isu substantif-struktural. Aktivitas ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada isu-isu seperti pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan keadilan gender melalui kacamata Al-Qur'an. Transformasi isu ini membuat agama tetap relevan di tengah arus modernitas dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki solusi konkret bagi permasalahan duniawi yang mendesak.

Sebagai penutup, transformasi isu ini memastikan bahwa aktivitas pusat kajian politik benar-benar membumi. Al-Qur'an tidak lagi berada di awan-awan teoretis, tetapi masuk ke dalam dokumen-dokumen kajian kebijakan, draf peraturan daerah, dan strategi kampanye edukasi politik. Melalui tafsir sosial, pusat kajian politik berhasil membuktikan bahwa nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai kemanusiaan universal yang mampu membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin) dalam realitas politik kontemporer.

4. KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas Pusat Kajian Politik (Puskapol) UIN Sumatera Utara Medan dilakukan melalui pendekatan integrasi-interkoneksi, di mana nilai-nilai teologis diterjemahkan ke dalam program kerja akademik dan sosial. Berdasarkan perspektif Tafsir Sosial (*Al-Tafsir al-Ijtima'i*), berikut adalah beberapa bentuk implementasi nyatanya: Internalisasi Nilai *Al-Amanah* (Integritas Akademik) dalam QS. An-Nisa ayat 58 Manifestasi Nilai *Al-'Adalah* (Keadilan Sosial) dalam QS. Al-Maidah Ayat 8. Penerapan Nilai *Al-Syuura* (Demokrasi Partisipatif) dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Nilai *Al-Ittihad* dan *Tasamuh* (Persatuan dan Toleransi) dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam sebuah Pusat Kajian Politik (Puskapol) memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga dakwah konvensional. Hal ini dikarenakan PUSKAPOL berdiri di persimpangan antara idealisme teks keagamaan dan realitas politik yang pragmatis serta empiris. Berikut adalah uraian mendalam

mengenai tantangan-tantangan tersebut: Tantangan Epistemologis: Integrasi Teks dan Sains Politik. Dilema Independensi dan Tekanan Politik Praktis. Resistensi Metodologis dan Profesionalisme SDM

Analisis Perspektif Tafsir Sosial dalam Aktivitas Pusat Kajian Politik yaitu terbagi dalam beberapa hal, yaitu: Dekonstruksi Tekstual menuju Rekonstruksi Sosial. Metodologi Dialektika: Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi. Al-Qur'an sebagai Instrumen Kritik Kebijakan. Transformasi dari Isu Teologis ke Isu Publik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, MA (2006). *Studi Islam di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Arkoun, M. (1996). *Nalar Islami dan nalar modern: Berbagai tantangan dan jalan baru* .
- Esack, F. (1997). *Al-Qur'an, telekomunikasi & pluralisme* .
- Fadl, KA (2001). *Berbicara atas nama Tuhan: Hukum Islam, otoritas dan perempuan* .
- Fauzan, M. (2019). Tantangan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 15 (2), 123–140.
- Hanafi, H. (1995). *Modus Islam di dunia*.
- Harb, A. (2003). *Kritik nalar Al-Qur'an* .
- Hidayat, K. (2006). *Memahami bahasa agama* .
- Insinyur, AA (1992). *Hak-hak perempuan dalam Islam* .
- Jannatul Firdausiyah, AR (2025). Relevansi Al-Qur'an dan hadis dalam pembentukan sosial nasional, etika politik, dan pengambilan keputusan di era kontemporer: Kajian terhadap pengaruhnya dalam kehidupan sosial, kebijakan publik, demokrasi, kepemimpinan, hukum, ekonomi, pendidikan, teknologi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3 ([1https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872](https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872)
- Rahardjo, MD (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir s*.
- Rakhmat, J. (2006). *Islam dan hal*. Serambi.
- Safi, L. (1996). *Landasan pengetahuan: Studi perbandingan bertemu*.
- Shihab, MQ (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan*.
- Umar, N. (2014). *Deradikalisa*.
- Wirman, EP (2019). *R*.
- Zarkasyi, HF (2012). *M*.